

MEDIA SOSIAL DAN PARTISIPASI PEMILU LEGISLATIF DI KOTA JAYAPURA

Syamsudin Usman¹, Arum Septiani Putri¹
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ekonomi, Sastra dan Sosial Politik
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
Syamusman01@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba untuk melihat seberapa jauh peran media social dalam meningkatkan partisipasi pemilih legislatif pada tahun 2019 di Kota Jayapura. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor media sosial tidak memberikan andil yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilihan legislatif di Kota Jayapura tahun 2019. Perangsang politik merupakan faktor dominan dalam merangsang pemilih untuk memilih anggota legislatif di Kota Jayapura 2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni, dengan menganalisa hasil pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka maupun observasi. Kemudian data diolah dan di ambil kesimpulan. Fokus dan lokus dari penulisan ini adalah penduduk di Kota Jayapura yakni di distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, distrik Heram dan Muara Tami yang telah memiliki hak pilih. Fakta lain yang ditemukan dalam penelitian ini, bahwa karakteristik pribadi tidak memberikan dampak bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Keikutsertaan masyarakat dalam kampanye bukan murni datang dari kesadaran diri pribadi, melainkan hanya ikut-ikutan, sehingga penyampaian visi, misi, maupun program calon legislatif tidak mempengaruhi pemilih untuk memberikan pilihannya dalam kotak suara. Pemilihan serentak tahun 2024 diharapkan setiap partai politik berperan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih untuk menentukan pilihannya. Calon legislatif dapat memanfaatkan media sosial dalam bentuk kampanye menyampaikan visi, misi, program untuk merangsang pemilih datang ke TPS.

Keywords: : Media sosial, partisipasi, pemilih, legislative, Partai politik

ABSTRACT

The purpose of this study is to see how far the role of social media has in increasing the participation of legislative voters in 2019 in Jayapura City. This study found that the social media factor did not contribute significantly to increasing involvement in the legislative elections in Jayapura City in 2019. Political stimulation was the dominant factor in stimulating voters to elect members of the legislature in Jayapura City in 2019. The approach used in this study was descriptive qualitative, namely, by analyzing the data collection results through interviews, central studies, and observation. Then the data is processed, and conclusions are drawn. The focus and locus of this writing are residents in Jayapura City, namely in the districts of North Jayapura, South Jayapura, Abepura, Heram, and Muara Tami districts, who already have the right to vote. Another fact found in this study is that personal characteristics do not impact voters' choices. Public participation in the campaign does not come purely from emotional self-awareness but only joins in so that the conveyance of the vision, mission, or program of the legislative candidate does not influence voters to cast their vote at the ballot box. In the 2024 simultaneous elections, each political party will provide political education to the public to increase voter participation in determining their choice. Candidates for the legislature can use social media through campaigns conveying the vision, mission, and programs to stimulate voters to come to TPS.

Keywords: *Social media, participation, voter, legislative, Political parties*

1. PENDAHULUAN

Media social sangat berperan dalam perkembangan sikap dan perilaku manusia modern. Penggunaan media social seperti whatapps, facebook, Instagram, merupakan hal yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Indonesia merupakan negara ke lima terbesar dalam penggunaan internet yaitu sebanyak 150 juta jiwa pengguna, dengan tingkat penetrasi sebanyak 56% [1], dengan demikian media social merupakan salah satu alat komunikasi yang paling sering di gunakan oleh masyarakat Indonesia. Media sosial seperti twitter, Instagram, facebook, tik-tok, youtube sering digunakan untuk berbagi informasi di dunia maya. Menurut Priyanto A dkk, media social dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi KPU untuk sarana sosialisasi dalam tahapan pelaksanaan Pemilu [2]. Sedangkan menurut Luthfi Ulfa Ni'amah, media social dapat digunakan oleh kandidat dalam membentuk opini kons-tiuen dalam partisipasi politik [3]. Oleh karena itu, melalui media sosial, kandidat dapat melakukan komunikasi politik dengan para pendukung atau kons-tiuenya, untuk membangun atau membentuk

opini publik dan sekaligus memobilisasi dukungan politik secara masif. Pemanfaatan media sosial juga telah meningkatkan jaringan komunikasi politik, relasi politik dan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. Hal ini sering kita jumpai dalam masa-masa kampanye politik para kandidat calon Kepala Daerah yang sedang maju dalam kompetisi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maupun kandidat calon presiden dalam Pilpres, dan dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg) (Ratnamulyani [4].

Media social merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Posisi strategis media social sangat diperlukan dalam meningkatkan partisipasi politik di negara demokrasi seperti Indonesia, untuk mewujudkan negara demokrasi, adalah dengan berpartisipasi dalam Pemilu. Partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. sehingga partisipasi politik, demokrasi dan legitimasi memiliki hubungan yang sangat erat.

Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji

pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Partisipasi sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana di upayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat.

Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dijadikan sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Herbert Mc Closky dalam Meriam Budiarjo mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan public. Sedangkan menurut Meriam Budiarjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah [5] selanjutnya partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft dalam Damsar yang di kutip oleh Arniti menyebutkan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik [6]. Alat ukur untuk mengetahui partisipasi, demokratisasi, dan legitimasi warga negara Indonesia dapat dilihat salah satunya melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui aktivitas dan antusiasme masyarakat mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum [6].

Verba dalam wibowo dkk, menyebutkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik akan memiliki perbedaan, terutama dalam hal motivasi, sumberdaya serta efek, serta kemampuan dalam hal penggandaannya. Aktivisme politik lain memiliki banyak kelebihan ketimbang sekadar tindak politik prosedural seperti voting. Tindakan kaya

informasi seperti melakukan kontak dengan pejabat menjadi mekanisme mediasi yang tepat untuk menyampaikan pesan spesifik dan rinci [7].

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa secara sistematis dan factual berdasarkan fakta-fakta ataupun fenomena yang terjadi [8].

Sugiono dalam Ratnamulyani dkk mengatakan bahwa metode kualitatif adalah "disebut pula metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah [4].

Pengolahan data dilakukan dengan cara data yang telah di kumpulkan melalui wawancara, pengamatan dan studi Pustaka, kemudian diolah dengan metode triangulasi selanjutnya di ambil kesimpulan.

Yang dijadikan sebagai focus pengumpulan data adalah masyarakat yang sudah memiliki hak untuk memilih dan berlokasi di Kota Jayapura.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Media Social dan Partisipasi Politik

Perkembangan media sosial tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. mengalami perkembangan yang sangat cepat dan berpengaruh pada semua aspek kehidupan, tidak terkecuali di ranah politik. Ni'amah dalam tulisannya mengatakan bahwa media Sosial mendukung adanya interaksi social yang memiliki fungsi, peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat. Facebook, Twitter, YouTube dapat menjadi instrument baru dalam diseminasi informasi politik tentang pemilu dan kandidat. Media sosial dapat dimanfaatkan dalam proses pembentukan opini tentang kesadaran partisipasi politik.

Dalam proses pemilihan umum dan penyampaian program kerja pasangan calon pada masa kampanye, media sosial menjadi salah satu alat yang sangat strategis. Media sosial

dapat digunakan untuk memberitakan isu-isu politik yang sedang terjadi sehingga menjadi bahasan yang menarik. Ini dapat dilihat langsung melalui trending topic, jumlah hashtag atau tagar dan unggahan yang dilakukan oleh warganet. Keberadaan media sosial ini juga membangun kedekatan antara publik dengan dengan pemilihnya [3].

Pada tahun 2019 media sosial sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Namun demikian penggunaan media sosial mengandung nilai positif dan negative seperti “pisau bermata dua” [2].

Dengan adanya media sosial masyarakat dengan gampang menerima informasi baik itu yang bersifat positif maupun juga bersifat negatif yang tentunya akan turut memengaruhi padangan masyarakat terhadap para calon. Ini juga semakin menegaskan bahwa kita mengalami keterbukaan informasi dengan semakin meningkatnya peran media masa baik cetak maupun elektronik [9].

Pemilu tahun 2019 merupakan Pemilu pertama yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kab. Kota dengan Pemilu Presiden. Berdasarkan data Bawaslu Kota Jayapura, jumlah daftar pemilih tetap pada Pemilu 2019 sebanyak 300.752 pemilih, terdiri dari pemilih perempuan sebanyak 140.807 atau sekitar 46,8%, dan pemilih laki-laki sebanyak 159.945 atau sekitar 53,2%. Dengan jumlah pemilih terbanyak di Distrik Abepura dan jumlah 88.425 pemilih sedangkan terkecil di Distrik Muara Tami sebanyak 10.982 pemilih.

Jumlah tempat pemungutan suara atau TPS sebanyak 1.262 buah, jumlah daerah pemilihan ada 4, terbagi atas Dapil Jayapura selatan sebanyak 10 kursi, Dapil Jayapura Utara sebanyak 10 kursi, Dapil Muara Tami dan Heram 8 kursi dan Dapil Abepura sebanyak 12 kursi total jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 40 kursi, ini mengacu pada UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 191 ayat 2e bahwa daerah dengan jumlah penduduk sebanyak 400.000 – 500.000 maka jumlah kursi sebanyak 40 kursi.

KPU Kota Jayapura sebagai salah satu Lembaga penyelenggara Pemilu di Kota Jayapura telah memanfaatkan media sosial untuk mensosialisasikan program kerja dan tahapan Pemilu. Informasi dari Devisi Teknis Pelaksanaan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (HUPMAS) KPU kota jayapura menyampaikan bahwa:

KPU Kota Jayapura punya akun media sosial seperti facebook, twitter, youtube, dan instagram hampir semua media sosial kita punya dan itu semua terus berjalan aktif sampai sekarang, media-media itu juga salah satunya yang kita pakai untuk terus lebih menjangkau masyarakat di samping bertemu secara langsung lewat sosialisasi langsung juga pastinya.

Hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Koordinator Sekertariat BAWASLU bahwa :

“Ada beberapa penyampaian-penyampaian dengan media sosial ya kami punya facebook, twitter, kami kota jayapura punya studio kemudian lembaga keterbukaan informasi kami punya semua dan semua itu jalan dengan baik ya untuk masyarakat bisa lebih tahu kegiatan kalau kita ada sosialisasi disini dan informasi-informasi terkait BAWASLU”

Sebagian masyarakat pemilih di Kota Jayapura telah memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi, penggunaan media sosial seperti facebook dan twitter di gunakan untuk lebih menarik partisipasi para pemilih. Dan hal itu sudah terlihat bisa lebih menarik minat para pemilih. Seperti halnya wawancara dengan Nani Karno sebagai berikut :

“Waktu melihat di media sosial banyak yang memposting soal pasang calon ini itu teman-teman saya membicarakan itu di bagi di beranda facebook mereka membagi foto. Saya jadi tertarik lihat yang mereka bahas tentang calon masing-masing sampai jadinya lucu saja mereka bahas sambil memberi pendapat masing-masing”.

Bahwa orang lebih tertarik berpartisipasi karena mendapat pengaruh dari media massa seperti facebook. Hal yang sama disampaikan juga dalam wawancara dengan Dorkas Waimuri sebagai berikut :

Saya banyak mendapatkan informasi dari social media saya lihat di facebook banyak sekali yang kirim-kirim gambar komentar-komentar, apalagi persaingannya sangat sengit, banyak sekali akun-akun yang memposting kelebihan dan kurangan masing-masing, saya jadi lebih semangat untuk ikut berkomentar dan mencoblos pada hari pelaksanaannya.

Hal yang sama disampaikan juga dalam wawancara dengan Maria Roberta sebagai berikut : Saat pemilu 2019 teman-teman kerja saya membagikan foto-foto calon mereka masing-masing, banyak sekali facebook beranda saya karna teman posting soal calon mereka akhirnya saya ikut milih calon yang teman saya kasih tau

juga karna tidak tahu harus nyoblos yang mana di televisi juga banyak bahas pemilu.

KPU dan BAWASLU Kota Jayapura juga menyampaikan menggunakan media sosial untuk lebih menarik minat masyarakat. Menurut analisis saya memang media massa mempunyai andil cukup besar dalam mempengaruhi minat pemilih dalam berpolitik, apalagi di era globalisasi seperti ini media sosial hampir dipergunakan semua kalangan dan semua umur. Media sosial bisa menjadi cara yang efektif yang dapat dilakukan pemerintah untuk bisa mempengaruhi para pemilih dalam berpolitik untuk menekan angka yang tidak ikut memilih misalnya.

3.2. Partisipasi Pemilih dalam Pemberian Suara

Partisipasi pemilih dalam pemberian suara adalah aspek yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Ini mencerminkan keterlibatan warga negara dalam memilih perwakilan mereka dan memiliki dampak langsung pada legitimasi dan representativitas pemerintahan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami tentang partisipasi pemilih dalam pemberian suara:

1. **Hak dan Kewajiban:** Partisipasi pemilih dalam pemberian suara adalah hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi. Pemilih memiliki hak untuk menentukan pemimpin mereka dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan politik. Kewajiban untuk menggunakan hak pilih juga merupakan tanggung jawab warga negara dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi.
2. **Memilih Perwakilan:** Dalam pemilihan umum, pemilih memilih perwakilan mereka, seperti anggota parlemen, walikota, atau presiden. Partisipasi pemilih memungkinkan pemilih untuk mempengaruhi komposisi pemerintahan dan kebijakan yang akan diterapkan. Dengan memilih perwakilan yang mewakili nilai dan kepentingan mereka, pemilih memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara.
3. **Merefleksikan Keinginan dan Preferensi:** Partisipasi pemilih dalam pemberian suara adalah cara bagi individu untuk mengekspresikan preferensi politik mereka. Melalui pemilihan, pemilih dapat menyampaikan pandangan mereka tentang isu-isu penting, ideologi politik, dan arah kebijakan yang mereka anggap penting. Dengan demikian, partisipasi pemilih mencerminkan suara dan kehendak rakyat.

4. **Mencerminkan Kepesertaan dalam Proses Demokrasi:** Partisipasi pemilih adalah cara untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dengan menggunakan hak pilih mereka, pemilih memberikan legitimasi kepada pemerintahan dan memainkan peran dalam pengambilan keputusan politik. Partisipasi pemilih yang tinggi mencerminkan keinginan masyarakat untuk berkontribusi dalam tata kelola negara.

5. **Memperkuat Representativitas:** Partisipasi pemilih yang luas meningkatkan representativitas sistem politik. Semakin banyak pemilih yang berpartisipasi, semakin besar kemungkinan bahwa hasil pemilihan akan mencerminkan preferensi dan kepentingan yang lebih luas di masyarakat. Dengan demikian, partisipasi pemilih yang tinggi mendukung representasi yang lebih akurat dan adil.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, penting untuk memiliki sistem pemilihan yang inklusif dan mudah diakses, menyediakan informasi yang transparan tentang proses pemilihan dan kandidat, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik. Selain itu, upaya untuk menghilangkan hambatan seperti intimidasi, diskriminasi, atau pemilih malas juga penting untuk mendorong partisipasi pemilih yang maksimal.

Partisipasi pemilih di Kota Jayapura pada pemilihan umum legislatif Tahun 2019 mengalami peningkatan. Jika pada pemilihan legislative tahun 2014 tingkat partisipatif di Kota Jayapura sebesar 74% naik diatas 85% pada pemilihan legislative tahun 2019 ini hal yang positif bagi perkembangan demokrasi di Kota Jayapura. Menurut Sem Refasi selaku devisa teknis, data dari KPU kota Jayapura partisipasi tidak hanya dilihat dari antisuia masyarakat untuk memilih saja tetapi bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pemilihan dari tahapn perencanaan, pendaftaran Parpol, pendaftaran Caleg, kampanye, masa tenang sampai hari pencoblosan seperti yang disampaikan sebagai berikut :

“ Menyangkut pemilu bukan tentang kesana mau nyoblos, partisipasi masyarakat dalam suatu demokrasi yang di sebut pemilu itu dilakukan dengan tahapan pemilu itu sendiri mulai dari tahapan perencanaan sesuai dengan jadwal hingga tahap sampai kepada masyarakat bisa menyalurkan hak politik dia melalui pencoblossan kemarin. Kalau hitung-hitung dari sisi partisipasi kemarin cukup luar biasa untuk kita kota jayapura

jumlah partisipasi sekitar 85% kemarin. Sehingga partisipasi ini merupakan sesuatu, kemarin juga dari rekapitulasi hasil perolehan suara baru kita bisa mengukurnya disitu berapa yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih baik laki-laki atau pun perempuan.

Hal itu juga sejalan dengan yang di sampaikan secara langsung oleh Anna Fakdower Koordinator Sekertariat BAWASLU Kota Jayapura sebagai berikut :

“ Kalau kita melihat waktu itu di tingkat Distrik waktu pemilu 2019 saya melihat partisipasi masyarakat di atas 50% karna sebagian menggunakan hak suaranya tetapi juga ada yang menjadi kendala yaitu penempatan TPS tadi itu, yang di KTP domisilinya dimana , memilih di TPS yang mana dan itu yang menjadi kendala. Antusias memilih untuk menyalurkan hak demokrasi untuk memilih anggota legislative tidak hanya terpengaruh oleh media social tetapi juga dikarenakan ada acuan legislative yang di sukai, seperti yang disampaikan oleh oleh Umi Habibah sebagai berikut :

“ Waktu Pemilu 2019 sepertinya antusias teman-teman saya kayanya luar biasa, mereka ikut memilih kasih hak suaranya. Saya ikut juga kasih hak suara karna memang mau ikut saja karna kebetulan saya liat ada calon yang saya suka. Memang ikut memilih juga kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Selain dikarenakan kesukaan terhadap calon anggota legislative, partisipasi memilih juga dikarenakan saudara atau teman yang juga mengajak untuk datang ke TPS seperti yang disampaikan oleh Wajumiati Kaimudin sebagai berikut :

“Kemarin pemilu 2019 saya ikut memberikan hak suara saya, itu ke tempat nyoblos atau TPS nya saya banyak dengan - yang lain sangat banyak di TPS jadi agak antri. Ikut kasih hak suara karna memang sudah jadi hak setiap warga negara buat ikut kebetulan ada teman ya sudah sama-sama pergi nyoblos malas juga kalau sendiri”.

Partisipasi masyarakat pada momen pemilu tidak hanya dilihat dari tingginya angka memilih yang hadir menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara. Namun, diukur dari tingkat kesadaran masyarakat serta keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Hasil diskusi dengan masyarakat memilih tentang pemanfaatan media sosial untuk kepentingan Pemilu didapati bahwa masyarakat lebih banyak

menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi diluar pemilu, begitupula dengan calon legislatif tidak menggunakan media sosial untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja. Sosialisasi lebih banyak menggunakan media spanduk dan poster seperti yang dilakukan oleh salah satu Caleg di Dapil Abepura:

“Bahwa untuk Sosialisasi kami lebih menggunakan spanduk dan poster untuk menarik hati para pemilih”.

Pendapat yang sama disampaikan juga oleh Caleg Dapil Heram dan Muara Tami:

“Kami lebih memaksimalkan tempel-tempel poster dan sapanduk. Kalau melalui facebook, Instagram, kami merasa tidak maksimal sebab kebanyakan digunakan untuk game”.

Sebelum melaksanakan pemilu itu biasa ada diskusi-diskusi sama sosialisasiso-sialisasi ya tentunya, sosialisasi tentang pemilu biasanya ke pemilih pemula ke sekolah-sekolah, kemudian ke disabilitas terus ke yang terkaitlah yang ada relasi dengan bawaslu untuk diskusi-diskusi apa yang perlu di evaluasi lagi.

Dari beberapa informasi yang ditemukan dalam pengolahan data bahwa masyarakat tidak terlalu tertarik untuk menggunakan media sosial dalam mencari informasi tentang calon yang akan di pilih. Pemilih lebih focus untuk mengurus kepentingan dan keperluan pribadi, tetapi ada juga yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan tentang politik, selain itu dikarenakan ikut-ikutan seadanya saja seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber sebagai berikut: wawancara dengan Suriani :

“Membicarakan soal politik saat mau pemilu tidak terlalu tertarik, karna teman bicaranya juga tidak ada dan masih sibuk mengurus keluarga juga paling ya hanya sekedar mencari tahu siapa calon-calon nya nanti.”

Sedangkan hasil wawancara dengan Wajumiati Kaimudin pernyataan yang sama juga di sampaikan sebagai berikut :

“Saya tidak terlalu suka bicara politik takut nanti malah sembarang nanti ada yang salah. Saya juga kurang paham politik jadi tidak tau harus membahas apa ya cuma siapa nama calon-calon nya begitu saja”.

Hasil wawancara dengan Julita Citra Dewi sebagai berikut :

“Saya dengan teman kantor saya kadang membicarakan calon ini dengan calon ini bagaimana ya, ya hanya sekedar membandingkan calon ini dengan yang ini kaya gitu

saja, kira-kira siapa ya yang akan jadi dapat kursi”.

Hal yang hampir sama juga di sampaikan oleh Ammar Daffa sebagai berikut :

“Menurut saya tidak terlalu penting ngomongin politik karna saya juga tidak terlalu paham politik, politik juga suatu hal yang membosankan kalau menurut saya, jadi itu kenapa saya tidak gabung untuk diskusi-diskusi politik karena membosankan. Diskusi-diskusi politik seperti itu sepertinya belum ada

3.3. Kampanye

Kampanye adalah kegiatan penting yang dilakukan dalam ajang kontestasi politik. Kampanye merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kandidat politik atau partai politik untuk memperkenalkan visi, misi, dan program mereka kepada publik serta mempengaruhi pendapat dan pilihan pemilih

Berikut adalah beberapa alasan mengapa kampanye penting dalam kontestasi politik:

1. **Memperkenalkan Kandidat:** Kampanye memungkinkan kandidat politik untuk memperkenalkan diri mereka kepada pemilih. Melalui kampanye, kandidat dapat menggambarkan latar belakang, pengalaman, dan kompetensi mereka, sehingga pemilih dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi.
2. **Mempromosikan Visi, Misi, dan Program:** Kampanye memberikan kesempatan kepada kandidat politik untuk mengkomunikasikan visi, misi, dan program mereka kepada publik. Ini memungkinkan pemilih untuk memahami pandangan politik kandidat dan mengukur kesesuaian dengan kepentingan mereka sendiri.
3. **Meningkatkan Partisipasi Politik:** Kampanye dapat meningkatkan partisipasi politik dengan mendorong pemilih untuk terlibat dalam proses pemilihan. Melalui kampanye yang efektif, kandidat dapat memotivasi pemilih untuk mendaftar sebagai pemilih, mempelajari isu-isu politik, dan secara aktif terlibat dalam pemilihan.
4. **Mendorong Diskusi dan Debat:** Kampanye sering kali menjadi platform untuk diskusi dan debat mengenai isu-isu politik yang penting. Kandidat politik dapat berdebat dengan rival politik mereka, mengadakan pertemuan dengan pemilih, atau berpartisipasi dalam

forum publik. Ini memberikan kesempatan bagi pemilih untuk mendengarkan berbagai pandangan dan mempertimbangkan argumen yang disajikan sebelum membuat keputusan pemilihan.

5. **Membangun Dukungan dan Menggalang Suara:** Kampanye merupakan waktu di mana kandidat politik berusaha untuk membangun basis dukungan dan menggalang suara. Mereka mengadakan pertemuan umum, tur kampanye, dan berinteraksi langsung dengan pemilih. Dalam proses ini, kandidat berharap untuk mendapatkan dukungan dan mempengaruhi pemilih agar memilih mereka saat pemilihan dilaksanakan.

Tujuan kampanye politik itu adalah untuk memobilisasi dukungan terhadap suatu hal atau seorang kandidat. Kampanye merupakan cara mempengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan pemberi informasi. Kampanye adalah kegiatan organisasi peserta pemilu yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pemilih dalam rangka usaha memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan kepala daerah. Kampanye sebagai salah satu rangkaian penting dalam proses pemilu sudah semestinya menjadi perhatian serius peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu, menjadi ruang komunikasi politik antara peserta pemilu dan masyarakat [10].

Dalam kegiatan kampanye masyarakat di Kota Jayapura sudah mengikuti kampanye sesuai dengan tujuan kampanye yang sebenarnya karena dalam kegiatan tersebut tidak hanya mencari hiburan saja namun untuk mendukung calon kepala daerah tertentu. Berikut hasil wawancara mengenai partisipasi pemilih dalam kampanye di ungkapkan langsung dari Bapak Sem Revasi selaku Devisi Teknis Pelaksanaan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (HUPMAS) sebagai berikut:

“Kita bisa lihat kalau masyarakat sangat antusias saat kampanye, artinya masyarakat sangat menyambut baik adanya pemilu seperti itu”.

Pemanfaatan media social untuk kampanye tidak dilakukan secara maksimal oleh para calon legislative, para calon lebih banyak menggunakan cara-cara konvensional dalam menyampaikan visi, misi maupun program kerja. Kampanye dilakukan dengan panggung hiburan, pawai, pembagian

baju, mebagi kartu nama, komunikasi politik antara calon legilalatif dengan pemilih lebih kepada komunikasi satu arah seperti yang disampaikan oleh beberapa sumber informan berikut :

“Kampanye saat pemilu 2019 mereka antusias nya tinggi ya untuk setiap calon-calon yang yang berkampanye, artinya mereka pasti mengikuti untuk mendengar visi misinya calon dan yang menentukan pilihan sesuai hati nuraninya. Model kampanye nya seperti biasa ya kampanye terbuka seperti panggung hiburan dan pawai”.

Wawancara dengan Jihan Fadila sebagai berikut : Saat ada kampanye saya ikut, ikut pawai keliling kota dan membagi-bagikan baju calon. Karena di ajak keluarga supaya tau aja politik dan pemilu waktu itu, juga bisa menambah pengalaman.

Aulya Purnamadewi sebagai berikut : Waktu itu saya ikut kampanye pakai baju calon dan membagi-bagikan kartu nama calon ke sekitar tempat tinggal sama ke teman-teman kebetulan yang jadi calon ayah saya sendiri jadinya ikut kampanye sekalian bikin rame dan seru-seruan pasti nambah pengalaman juga

Hal yang sama juga seperti wawancara dengan Dita Fasha sebagai berikut :

Saat ada kampanye saya ikut ada karna tertarik saja ada yang di selenggarakan di hotel juga tempatnya bagus iya sudah ikut aja dan panggung hiburannya ikut pawai, iya pakai baju yang di bagi-bagi juga ada gambar calon anggota legislatif juga, seru-seruan juga buat mengisi waktu luang juga kemarin.

3.4. Perangsang Politik

Karakteristik pribadi seseorang merupakan faktor pendorong seseorang dalam berpartisipasi politik. Para pemilih di Kota Jayapura mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda. Pemilih di Kota Jayapura masih bersifat tradisional. Sebagian besar 60-76% memilih calon anggota dengan tidak memperhatikan visi, misi, program yang diusulkan oleh para kandidat. Pemilih lebih tertarik untuk melihat figure pribadi dari calon yang akan di pilih, kedekatan emosional, etnis tertentu serta ketokohan.

Para pemilih lebih memilih calon yang secara keuangan dan ekonomi lebih siap. Menurut data KPU Kota Jayapura anggota DPRD Kota Jayapura lebih 50% adalah anggota baru dan tidak berlatar belakang politik tetapi pengusaha. Ini juga dibenarkan oleh salah satu anggota DPRD yang mengatakan bahwa anggota DPRD Kota Jayapura 50% adalah anggota baru yang

rata-rata berprofesi sebagai pengusaha.

Media social tidak memiliki peran yang sangat besar untuk mempengaruhi pemilih dalam memilih calon legislative dengan dengan karakter pribadi social yang kuat seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber sebagai berikut:

“Karna etnis,suku, dan agama apalagi kita di Papua ya masih dengan adat-adatnya pasti sebagian masyarakat ada yang begitu kita tidak bisa bilang tidak, di Papua sendiri masih ya masih banyak yang memilih karna dia satu marga keluarga saya masih ada hubungan keluarga pasti itu. Kalau agama tidak begitu ya hanya saja seperti dari satu keluarga atau masih ada hubungan keluarga yang banyak saya lihat.

Kita ini khususnya di Papua pasti masih ada yang mempertimbangkan dari satu nama marga, saudara dari keluarga masih banyak yang seperti itu. Namun demikian ada juga yang memilih tidak berdasarkan etnis atau agama tertentu tapi memilih didasarkan karean kewajiban sebagai warga negara. wawancara dengan Rosdiana sebagai berikut:

“Saya kalau untuk ikut partisipasi karena alasan satu etnis,suku atau agama kemarin itu tidak karna ikut memang sudah kewajibban warga negara berpartisipasi dalam pemilu yang hanya 5 tahun sekali tidak usahlah melihat dari segi etnis atau agama begitu ya di lihat dari hasil-hasil kerjanya saja”.

Olin Borai sebagai berikut: Tentunya saja tidak melihat dari agama,etnis, dan suku kita melihat kedepannya hasil kerjanya atau bagaimana kemarin dia kerjanya, partisipasi dalam pemilu juga tidak sering-sering kan jarang jadi ikut-ikut saja memang kasih hak suara sudah wajib. wawancara dengan Nurhayati sebagai berikut:

“Ikut partisipasi waktu itu kalau karna satu etnis atau agama itu tidak karna tidak penting, yang harus dilihat kan hasil kerja dan visi misi nya tanpa lihat agama atau etnisnya. Yang di harapkan pastinya hasil kerjanya apa hasil kerja di pengaruhi dari agama atau etnis orangnya tentu tidak”

Dari penjelasan yang telah diungkapkan beliau terlihat bahwa faktor partisipasi pemilih karena karakteristik sosial atau dengan mempertimbangkan dari segi ras, etnis, dan agama juga kurang tepat karna menurut yang di sampaikan bahwa yang menjadi pertimbangan adalah visi misi dan bagaimana cara kerjanya.

Pendidikan politik juga aspek yang penting

mendukung meningkatkan partisipasi setiap pemilu melalui kegiatan sosialisasi. Pendidikan politik merupakan kewajiban dari setiap partai politik, namun demikian pendidikan politik merupakan tanggungjawab setiap warga negara agar dapat memilih anggota legislative yang lebih berkualitas agar melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik dan pro terhadap masyarakat

4. KESIMPULAN.

Perkembangan teknologi turut mempengaruhi dalam perkembangan media social. Dengan ditemukannya internet sangat mempengaruhi dalam komunikasi antar manusia. Jarak bukan lagi merupakan masalah. Dalam dunia politik pengaruh media social dirasakan sangat dominan. Proses sosialisai program krja KPU Kota Jayapura di rasakan lebih terbantu dengan menggunakan media social. Informasi-informasi tahapan Pemilu dapat menggunakan media Sosial seperti facebook, Instagram dll.

Proses kampanye oleh calon legislative pada Pemilu 2019 di Kota jayapura belum sepenuhnya memanfaatkan media social sebagai sarana kampanye. Factor usia dan melek teknologi juga sangat mempengaruhi penggunaan media sosial dalam menyampaikan visi, misi dan program kerja kandidat. Kampanye masih menggunakan cara-cara konvensional seperti pasang spanduk, pembagian kartu nama, baju kaos, panggung hiburan, pawai. Porsi untuk media social masih kurang. Factor lain yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya lebih didominasi oleh ketokohan, figure dari calon legislative, kemapanan secara ekonomi, hubungan emosional. Untuk menjada partisipatif dari pemilih maka diperlukan Pendidikan politik yang merupakan tanggungjawab partai politik maupun setiap warga negara dan para kandidat calon legislative yang harus dilakukan secara masiv.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Siregar, A. U. (2021). Penggunaan Media Sosial pada Pemilih Pemula dalam Partisipasi Politik Pasca Pemilihan Presiden 2019 di Kota Medan. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 7(1). <https://doi.org/10.31289/simbollika.v7i1.4265>
- [2]. Priyanto, A., Purnomo, E. P., Fadhurrohman, M. I., Fahamsyah, H., & Khairina, E. (2021). The Influence of Social Media (Instagram) of Bantul's General Election Commissions on Voters Participation in the 2019 Elections. *Journal of Government and Civil Society*, 5(1). <https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i1.2924>
- [3]. Ni'amah, L. U. (2018). Pemilih Muda, Sosial Media dan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung 2018. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.31764/jail.v2i1.536>
- [4]. Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora*, 20(2). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.13965>
- [5]. Budiardjo Miriam. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*.
- [6]. Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- [7]. Wibowo, K. A., Rahmawan, D., & Syafaat, A. H. (2020). Efikasi politik dan jenjang partisipasi politik pemilih pemula. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2). <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.26433>
- [8]. Nazir. Moh. (2014). *Metode Penelitian* (Vol. 9).
- [9]. Perangin-angin, L. L. K., & Zainal, M. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial. *Jurnal ASPIKOM*, 3(4). <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i4.210>
- [10]. Perdana, A., & Wildianti, D. (2018). Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. *Jurnal Bawaslu DKI, Desember*(December 2018).